

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETIDAKEFEKTIFAN
PERENCANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN WEBSITE
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

FIO ALFARRUQ

07011181621178

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETIDAKEFEKTIFAN
PERENCANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN WEBSITE
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Fio Alfarruq
07011181621178

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2021

Pembimbing I

Drs. Mardianto. M.Si
NIP. 196211251989121001


.....

Pembimbing II

Ermanovida. S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001


.....

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor Ketidakefektifan Perencanaan Anggaran Pengelolaan Website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Juni 2021.

Indralaya, 9 Juni 2021

Ketua

1. Drs. Mardianto. M.Si
NIP. 196211251989121001

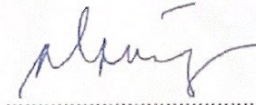


Anggota

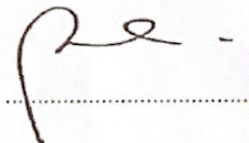
2. Ermanovida. S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002



4. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si.
NIP. 196309106199031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Publik



Zarlani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Some people might don’t like you just because your strenght
remind them of their weakness,
so don’t let the hate slow you down”*

Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

“For those who kept doubting my college life, eat your word!”

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Ketidakefektifan Perencanaan Anggaran Pengelolaan Website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan serta untuk mengukur pengaruh dari faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi ketidakefektifan perencanaan anggaran pengelolaan website. Konsep yang digunakan ialah konsep faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas anggaran dari Sutarto yang meliputi faktor internal dan eksternal. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survei. Teknik pengumpulan data terdiri dari: kuisioner, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan jika faktor eksternal berpengaruh secara parsial yakni sebesar 44,9 persen, sedangkan faktor internal tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh lemah, dan faktor internal serta eksternal berpengaruh secara simultan. Saran penelitian ini ialah perencanaan anggaran harus dilakukan tepat waktu dengan studi yang baik serta memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran pada proses perencanaan anggaran dilakukan.

Kata Kunci: Efektivitas, perencanaan anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, internal, eksternal

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya.**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Ineffective Factors of Website Management Budget Planning at the National and Political Unity Agency of South Sumatra Province in 2019". This study aims to determine the dominant factors and to measure the influence of internal and external factors in influencing the ineffectiveness of website management budget planning. The concept used is the concept of factors that affect the effectiveness of the budget from Sutarto which includes internal and external factors. The research method used is descriptive quantitative with survey research methods. While data collection techniques consist of: questionnaires, documentation, and observation. The results of this study indicate that external factors have a partial effect which is 44.9 percent, while internal factors have no significant or weak effect, and internal and external factors have a simultaneous effect. The suggestion of this research are budget planning must be carried out on time with a good studies, and also provide strict sanctions for employees who violate the budget planning process.

Keywords: Effectiveness, budget planning, National and Political Unity Agency, internal, external.

Advisor I



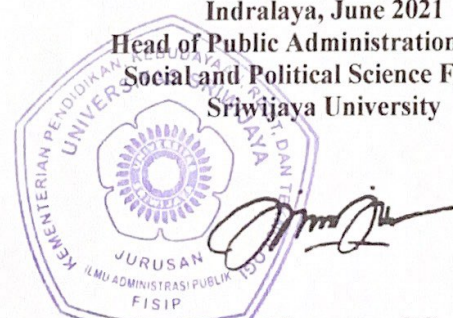
Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, June 2021
Head of Public Administration Major
Social and Political Science Faculty
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-faktor Ketidakefektifan Perencanaan Anggaran Pengelolaan Website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019**. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irman dan Ibu Zahara selaku orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang yang tidak tergantikan, dukungan serta doanya
2. Calon jodoh yang masih dirahasiakan oleh Allah SWT
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Mardianto. M.Si dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ketulusan hati membimbing, mengarahkan penulisan dalam kebutuhan akademik selama masa studi di Universitas Sriwijaya.
6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala arahan, wawasan, serta pengetahuan yang diberikan sepenuh hati.
7. Kepala, sekretaris dan seluruh pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel yang telah membantu penulisan terutama pengambilan data di kantor tersebut.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik Unsr

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kekurangan dari penulisan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan Kantor Kesbangpol Prov Sumsel.

Indralaya, Juli 2021



FIO ALFARRUQ
NIM. 07011181621178

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	10
1. Keuangan Negara	10
2. Anggaran	11
3. Efektivitas	12
4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas	14
5. Pengukuran Efektivitas	18
6. Kegiatan Pengelolaan Website	23
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Hipotesis	25
D. Kerangka Pemikiran	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Definisi Konsep	28
C. Definisi Operasional	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Populasi dan Sampel	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Pemberian Skor	33
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	34
I. Uji Asumsi Klasik.....	35
I. Teknik Analisis Data	37
J. Sistematika Penulisan	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel	43
1. Sejarah Singkat	43
2. Visi Dan Misi.....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
4. Struktur Organisasi	46
B. Hasil dan Pembahasan	47
1. Deskripsi Responden	48
2. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	49
3. Analisis Distribusi Frekuensi Variabel.....	52
4. Uji Asumsi Klasik	66
5. Uji T (Parsial) dan Hipotesis Statistik	69
6. Uji F (Simultan) dan Hipotesis Statistik.....	71
7. Uji Regresi Parsial	73
8. Uji Regresi Berganda.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	80
------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	5
Tabel 2. Perbandingan Tingkat Efektivitas	6
Tabel 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah	7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 5. Definisi Operasional	30
Tabel 6. Gradasi Penilaian untuk Setiap Indikator Penilaian	34
Tabel 7. Jumlah Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 8. Jumlah Responden Berdasarkan Status Pendidikan Terakhir	48
Tabel 9. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Faktor Internal (X1).....	49
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Faktor Eksternal (X2).....	50
Tabel 12. Hasil Uji Validitas Efektivitas (Y)	50
Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 14. Penilaian Responden Terhadap Perencanaan anggaran setiap kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel telah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya.....	52
Tabel 15. Penilaian Responden Terhadap Perencanaan anggaran setiap kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar	53
Tabel 16. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Departementalisasi	53
Tabel 17. Penilaian Responden Terhadap Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel mampu berinovasi dalam merencanakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan	54
Tabel 18. Penilaian Responden : Dalam merencanakan anggaran setiap kegiatan, para pegawai di Badan Kesbangpol Prov. Sumsel selalu melakukan koordinasi antar bagian	54
Tabel 19. Penilaian Responden Terhadap Sarana dan prasarana pendukung dalam merencanakan anggaran setiap kegiatan telah mencukupi	55
Tabel 20. Penilaian Responden Terhadap Modernisasi sarana dan prasarana pendukung untuk merencanakan anggaran telah dilakukan	55

Tabel 21. Penilaian Responden Terhadap Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan sejumlah anggaran guna mendukung proses perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan.....	56
Tabel 22. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Berkelanjutan.....	56
Tabel 23. Penilaian Responden Terhadap Setiap pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sudah mampu mengambil keputusan jika ada suatu masalah yang terjadi dalam melakukan pekerjaan	57
Tabel 24. Penilaian Responden Terhadap Setiap pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sudah mampu mengambil keputusan jika ada suatu masalah yang terjadi dalam melakukan pekerjaan	57
Tabel 25. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Kepemimpinan.....	58
Tabel 26. Penilaian Responden Terhadap Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keterampilannya masing-masing	58
Tabel 27. Penilaian Responden Terhadap Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keterampilannya masing-masing	59
Tabel 28. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Kepemimpinan.....	59
Tabel 29. Deskripsi Variabel Faktor Internal	60
Tabel 30. Penilaian Responden Terhadap Perencanaan anggaran setiap kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60
Tabel 31. Penilaian Responden Terhadap Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	61
Tabel 32. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Lingkungan Mikro	61
Tabel 33. Penilaian Responden Terhadap Faktor politik berpengaruh dalam merencanakan anggaran kegiatan	62
Tabel 34. Penilaian Responden Terhadap Kondisi perekonomian berpengaruh dalam merencanakan anggaran kegiatan	62
Tabel 35. Penilaian Responden Terhadap Perubahan teknologi berpengaruh dalam merencanakan anggaran kegiatan	63
Tabel 36. Penilaian Responden Terhadap Pegawai memiliki kesadaran penuh dalam memperbaiki ataupun meningkatkan karir	63
Tabel 37. Rekapitulasi Penilaian Sub Dimensi Lingkungan Makro	64
Tabel 38. Deskripsi Variabel Faktor Eksternal	64
Tabel 39. Penilaian Responden Terhadap Pekerjaan perencanaan anggaran kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selesai tepat waktu	65

Tabel 40. Penilaian Responden Terhadap Anggaran setiap kegiatan telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan	65
Tabel 41. Deskripsi Variabel Efektivitas.....	66
Tabel 42. Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 43. Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 44. Hasil Uji Linearitas Varibel Y pada X1	68
Tabel 45. Hasil Uji Linearitas Varibel Y pada X2	68
Tabel 46. Heteroskedastisitas	69
Tabel 47. Uji T (Parsial) Faktor Internal (X1) dan Faktor Eksternal (X2).....	69
Tabel 48. Hasil Uji F (Simultan)	71
Tabel 49. Regresi Dimensi Faktor Internal (X1) terhadap Ketidakefektifan perencanaan anggaran (Y)	73
Tabel 50. Regresi Dimensi Faktor eksternal (X2) terhadap Ketidakefektifan perencanaan anggaran (Y)	73
Tabel 51. Hasil Uji Regresi Berganda	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Faktor-Faktor Efektivitas	16
Gambar 2. Cara Kerja Efektivitas.....	21
Gambar 3. Rumus Efektivitas Menurut Mahmudi	22
Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Penunjukan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi.....	81
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	82
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	83
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	84
5. Kuisisioner Penelitian	86
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Website	90
7. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan.....	92
8. Hasil Cek Plagiasi.....	94
9. Data Hasil Perhitungan SPSS	95

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. BANKESBANGPOL : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. BAPPEDA : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. KUA-PPAS : Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran
7. MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
9. PERDA : Peraturan Daerah
10. PERGUB : Peraturan Gubernur
11. PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12. PROV : Provinsi
13. RENSTRA : Rencana Strategi
14. RKA : Rencana Kerja Anggaran
15. SEKDA : Sekretaris Daerah
16. SUBBAG : Sub-Bagian
17. SUMSEL : Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentang alam Indonesia yang memiliki luas lebih dari 1,9 juta km² menjadikan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luasnya negara ini pun linear dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yaitu lebih dari 250 juta orang. Fakta-fakta diatas menjadi bukti jika negara yang luas ini membutuhkan pemerintahan yang berdaulat serta menjangkau semua. Keberadaan pemerintah pusat saja tidak akan cukup untuk mengatur kehidupan di negara ini. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintahan di Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah wewenang, hak, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahannya secara pribadi. Namun, kolaborasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap terjalin.

Dalam melaksanakan otonomi daerah maka setiap daerah diatur oleh pemerintah setingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga unit terkecil yaitu desa. Pada tingkat Provinsi, pemerintahan dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Untuk merealisasikan visi misi dari seorang gubernur dan wakil gubernur maka dibentuklah organisasi perangkat daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, organisasi perangkat daerah dikelompokkan menjadi lima elemen, dan salah satu diantaranya adalah badan/fungsi penunjang (*technostructure*). Badan ini memiliki fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga menjalankan fungsi pemerintahannya sendiri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 27 dinas dan 9 badan. Dimana salah satu badan yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Badan tersebut merupakan sebuah institusi teknis di tingkat provinsi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan yang berada dibawah wilayah kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan ini memiliki tugas utama pada bidang mengurus ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada perkembangannya badan ini telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia serta demokratisasi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Dalam mengelola program kerja yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri keuangannya. Pembiayaan dari setiap program kerja yang ada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, jalannya siklus keuangan harus memerhatikan faktor efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tahapan yang dilalui pada perencanaan program kerja ini tentu diawali dari menyusun rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang kemudian diajukan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Nantinya melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hal tersebut akan dibahas secara bersama sebelum ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya ditujukan ke DPRD untuk dimasukkan dalam APBD. Kemudian diteruskan prosesnya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019 memiliki 8 program dan 39 unit kegiatan.

Program dan kegiatan diatas direncanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu programnya mengenai pelayanan administrasi perkantoran pada unit kegiatan pengelolaan website. Program tersebut merupakan perwujudan dari kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 47 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan *Smart Province*. Pada pasal 6 ayat 2D peraturan tersebut dijelaskan jika salah satu bentuk layanan Sumatera Selatan *Smart Province* adalah website Pemerintah Provinsi dan website OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Lebih lanjut dijelaskan pada BAB VI bagian kedua tentang website OPD Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap OPD wajib memiliki website yang berfungsi sebagai media yang memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi atau transaksi berkaitan dengan pelayanan OPD bersangkutan”. Hal ini secara jelas menerangkan jika setiap OPD harus memiliki website guna menunjang operasional kantor dan sebagai media informasi pada masyarakat. Selain itu, website juga berguna untuk melaksanakan digitalisasi pelayanan publik. Namun, faktanya dilapangan masih ditemui beberapa masalah yang berkaitan dengan program pengelolaan website. Adapun permasalahan tersebut :

1. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak berfungsi dan tidak dapat diakses oleh publik

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan jika sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat diakses oleh publik. Permasalahan ini diketahui ketika penulis melakukan Kuliah Kerja Praktek di kantor tersebut pada periode Mei hingga Juni 2019 yang lalu.

Badan ini juga memiliki tupoksi untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian di kantor-kantor dinas ataupun badan dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap hari kerja, ramai mahasiswa yang datang untuk sekedar menanyakan persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk mengurus izin penelitian. Padahal seharusnya perihal persyaratan teknis pelayanan sudah ada pada website kantor-kantor pelayanan publik. Kejadian ini membuat penulis menemukan fakta bahwa website tersebut tidak dapat diakses sejak 2017 yang lalu.

Bahkan pada saat ini domain website yang dimiliki telah terhapus secara otomatis dari sistem internet. Sehingga ketika masyarakat mencari informasi mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan maka akan dialihkan pada website induk dari Pemerintah Povinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Jika dilihat lebih jauh pada website induk pemerintah provinsi Sumatera Selatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak tercatat dalam daftar badan dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan hal ini dikarenakan tidak ada koneksi antara website OPD yang pada hal ini yaitu website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan website induk dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

2. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Website Nihil Realisasi

Berdasarkan Pergub nomor 47 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan *Smart Province* pasal 16 ayat 8 disebutkan jika anggaran yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi OPD dan tim operasional aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran OPD yang bersangkutan. Berikut adalah petikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang telah diaudit pada program pelayanan administrasi perkantoran pada unit kegiatan pengelolaan website sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Nominal	%
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.975.400,00	99,18
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.000.000,00	109.265.031,00	87,41
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	265.000.000,00	256.183.825,00	96,67
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.200.000,00	23.100.000,00	91,67
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	243.639.000,00	205.000.000,00	84,14
6.	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	99.991.375,00	99,99
7.	Penyediaan barang cetakan, penggandaan	20.000.000,00	19.998.125,00	99,99
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	25.000.000,00	22.913.000,00	91,65
10.	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	75.815.000,00	75,82
11.	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	472.471.090,00	365.730.000,00	77,41
12.	Pengelolaan website	54.679.455,00	0,00	0,00
13.	Penyediaan jasa publikasi	95.800.000,00	95.200.000,00	99,37
14.	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah, dan luar negeri	425.000.000,00	402.359.346,00	94,67
Total		1.964.790.095,00	1.683.531.102,00	85,59

Sumber : diolah penulis berdasarkan data dari sub bagian keuangan dan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Dari laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan tahun anggaran 2019 tersebut, diketahui jika kegiatan pengelolaan website mencatatkan realisasi anggaran sebesar 0% atau nihil realisasi. Jika diukur dengan rumus efektivitas yang dicetuskan oleh Mahmudi, maka anggaran tersebut terkategori sebagai anggaran tidak efektif.

Tabel 2. Perbandingan Tingkat Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100%	Sangat Efektif
86% - 99%	Efektif
76% - 85%	Cukup Efektif
51% - 75%	Kurang Efektif
Kurang dari 50%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UI Press (2011:170)

Menurut Mahmudi (2011:21) efektivitas adalah suatu komparasi dari output yang diinginkan dengan realitas hasil yang terjadi dilapangan. Sehingga pengelolaan keuangan dapat dikatakan efektif jika secara keseluruhan kegiatannya dapat dicapai sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi sebelumnya. Berkaca dengan pengertian efektivitas diatas anggaran kegiatan pengelolaan website masuk dalam kategori tidak efektif karena tidak terjadi realisasi anggaran sama sekali.

3. Terjadi Kesalahan Dalam Perencanaan Mata Anggaran

Unit kegiatan pengelolaan website memiliki fungsi untuk membantu pelayanan administrasi perkantoran, media menyebarluaskan informasi publik, dan mendukung digitalisasi pelayanan publik. Sehingga anggaran dari unit kegiatan ini seharusnya dialokasikan untuk dibelanjakan hal-hal yang terkait dengan operasional website. Namun pada proses perencanaannya, anggaran pengelolaan website tidak dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya, hal tersebut terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan	: 1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan			
Organisasi	: 1.05 1.05.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program	: 1.05 1.05.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 1.05 1.05.02 01.28	Pengelolaan Website			
Lokasi	: Palembang				
Sumber dana	: Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak				
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
5	Belanja				
5.2	Belanja langsung				
5.2.2	Belanja barang dan jasa				
5.2.2.03	Belanja jasa kantor				
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili / internet / intranet / Tv kabel / Tv satelit	1,00	Keg	54.679.455,00	54.679.455,00

Sumber: diolah penulis berdasarkan data dari sub bagian keuangan dan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung diatas dapat kita ketahui jika anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pengelolaan website, pada perencanaannya malah dianggarkan untuk pembelanjaan kawat/faksimili/ internet/intranet/Tv kabel/Tv Satelit. Data diatas menjadi bukti jika perencanaan anggaran dilakukan tidak efektif sehingga menimbulkan nihil realisasi dan berdampak pada operasional website yang tidak dapat diakses.

Fakta-fakta yang terjadi diatas tentu memiliki faktor yang memengaruhinya sehingga efektivitas dari anggaran tersebut tidak tercapai. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas ini dijelaskan oleh Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60) yaitu :

1. Faktor internal, faktor ini merupakan faktor yang ada pada organisasi tersebut secara internal. Dimana faktor ini timbul dari interaksi antar orang yang ada pada organisasi tersebut yang satu sama lain saling bekerjasama. Faktor internal ini cenderung lebih mudah untuk diawasi maupun dikendalikan. Namun bukan berarti faktor ini dapat diabaikan.

2. Faktor eksternal, sedangkan faktor ini menjangkau lebih luas lagi karena berkaitan dengan lingkup luar dari organisasi tersebut. Hubungan yang terjadi antar instansi dengan pihak luar inilah yang menjadi faktor-faktor eksternal. Faktor ini cenderung lebih sulit untuk dikendalikan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dari perencanaan anggaran kegiatan pengelolaan website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor yang memengaruhi tidak efektifnya perencanaan anggaran pengelolaan website tersebut dan dapat menjadi referensi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola anggaran belanja lebih efektif lagi agar kesalahan yang terjadi dapat diantisipasi dimasa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka berikut adalah rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidakefektifan perencanaan anggaran pengelolaan website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019?
2. Seberapa besar pengaruh dari faktor internal dan eksternal terhadap ketidakefektifan perencanaan anggaran pengelolaan website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketidakefektifan perencanaan anggaran pengelolaan website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Selain itu bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap ketidakefektifan perencanaan anggaran pengelolaan website di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Sekaligus penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan anggaran terutama pada kegiatan pengelolaan website kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, tentunya dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk mendalami ilmu pengetahuan dibidang administrasi publik lebih khusus lagi yang berkaitan dengan keuangan negara. Sekaligus nantinya dapat menjadi tambahan referensi bagi para peneliti lain yang mengkaji bidang yang sama yakni mengenai Efektivitas Perencanaan Anggaran Belanja (studi kasus pada kegiatan Pengelolaan Website) terutama di kantor-kantor pemerintahan atau sektor publik.
2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil dari penelitian ini diproyeksikan dapat menambah sumber informasi, ide, dan masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi anggaran secara mendalam dan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta.
- M Steers, Richard. 1986. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UI Press.
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Siagian, Sondang P. 1978. Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya. Surabaya: Gita Karya.
- Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Alfin. 2011. Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum Bandung PT: Alumni
- Suparmoko, 2011. Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta: BBFE.
- Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Cetakan Ketiga Kencana Prenada Media Group
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2002. Manajemen SDM Birokrasi Publik; Keunggulan Pelayanan Publik. Jogjakarta: YPAPI.
- Tim Penyusun. 2016. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Indralaya: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri
- Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rujukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel *Smart
Province*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Skripsi & Jurnal

M.F. Syahril, Ventje Ilat. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
Jurnal EMBA

Nurul Fajar dan Muhamad Arfan. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Aceh. Aceh: Universitas Syah Kuala

Rahmawaty M. Bumulo dkk. 2018. Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Sebagai
Alat Pengendalian Belanja Langsung Pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara.
Manado: Universitas Sam Ratulangi

Silpi Wulandari. 2020. Analisis Faktor-Faktor Ketidakefektifan Penyerapan Anggaran Di
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Indralaya:
Universitas Sriwijaya

Stevany Hanalya Dethan. 2017. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram: Universitas Maha saraswati